

Bank Soal EduGen AI

Jenjang: SMP | Kelas: Kelas 8 | Mata Pelajaran: PPKn

Topik: BAB III Peraturan di Negeraku, A. Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan NegerakuB. Pengertian Tata Urutan Perundang-undangan, C. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, D. Implementasi Peraturan Perundang-undangan E. Komitmen Penerapan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Peraturan yang dibuat di lingkungan keluarga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan. Apabila seorang anak melanggar kesepakatan jam malam yang telah ditetapkan oleh orang tuanya, sanksi yang paling tepat dan edukatif sesuai dengan norma keluarga adalah...

- A. Didenda dengan memotong uang saku selama satu bulan penuh
- B. Dibiarkan saja agar anak belajar dari kesalahan secara mandiri
- C. Dilaporkan kepada pihak sekolah agar mendapatkan poin pelanggaran
- D. Diberikan nasihat, pembatasan hak bermain, dan diminta membuat komitmen perbaikan diri

Jawaban: Diberikan nasihat, pembatasan hak bermain, dan diminta membuat komitmen perbaikan diri

Penjelasan: Dalam lingkungan keluarga, sanksi bersifat edukatif dan membina. Nasihat dan pembatasan hak sementara lebih efektif daripada hukuman fisik atau denda.

2. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Setiap hari Senin, seluruh siswa SMP Negeri 1 diwajibkan mengikuti upacara bendera dengan seragam lengkap. Aturan ini merupakan bentuk implementasi dari peraturan di tingkat...

- A. Rumah
- B. Sekolah
- C. Lingkungan Masyarakat
- D. Negara

Jawaban: Sekolah

Penjelasan: Upacara bendera dengan seragam lengkap adalah aturan yang dibuat oleh pihak sekolah untuk menanamkan kedisiplinan dan nasionalisme siswa di lingkungan sekolah.

3. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Budi adalah siswa kelas 8 yang sering datang terlambat ke sekolah. Alasan Budi selalu sama, yaitu bangun kesiangan karena bermain game online hingga larut malam. Wali kelas sudah memberikan peringatan, namun Budi tetap mengulanginya.

Berdasarkan cerita di atas, sikap Budi mencerminkan pelanggaran terhadap norma dan peraturan sekolah. Langkah pemecahan masalah (problem solving) yang paling tepat untuk menangani kasus Budi dari sudut pandang pembinaan karakter adalah...

- A. Budi langsung dikeluarkan dari sekolah agar menjadi contoh bagi siswa lain
- B. Guru BK memanggil Budi untuk mencari akar masalah penyebab dia sering terlambat dan bermain game, lalu memberikan pendampingan psikologis
- C. Sekolah membiarkan Budi karena bermain game adalah hak asasi anak
- D. Budi dihukum lari keliling lapangan sebanyak 50 kali setiap kali terlambat

Jawaban: Guru BK memanggil Budi untuk mencari akar masalah penyebab dia sering terlambat dan bermain game, lalu memberikan pendampingan psikologis

Penjelasan: Pemecahan masalah yang kompleks (HOTS) menuntut penyelesaian hingga ke akar masalah (root cause), bukan sekadar menghukum. Pendampingan psikologis membantu mengubah perilaku jangka panjang.

4. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Di sebuah kompleks perumahan, terdapat aturan bahwa warga dilarang membunyikan musik dengan volume keras di atas jam 10 malam. Aturan ini disepakati bersama oleh warga. Suatu malam, Pak Andi merayakan ulang tahun anaknya dengan pesta musik hingga jam 12 malam. Tindakan Pak Andi menunjukkan...

- A. Pelanggaran terhadap peraturan negara yang berujung pada hukuman penjara
- B. Pelanggaran terhadap peraturan di lingkungan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum
- C. Penerapan hak asasi manusia untuk berekspresi di rumah sendiri
- D. Pelanggaran terhadap norma agama yang berlaku di Indonesia

Jawaban: Pelanggaran terhadap peraturan di lingkungan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum

Penjelasan: Aturan larangan musik keras malam hari adalah kesepakatan warga (lingkungan masyarakat). Melanggarnya berarti mengganggu ketertiban dan ketenteraman warga lain.

5. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Skenario Situational Judgement Test (SJT)

Anda adalah ketua kelas. Anda melihat dua orang teman Anda, Rina dan Siti, sedang bertengkar hebat karena Rina menuduh Siti mengambil pulpennya tanpa izin, yang melanggar tata tertib kelas tentang saling menghargai barang milik teman. Sebagai ketua kelas, tindakan Anda adalah...

- A. Melerai keduanya, meminta mereka duduk bersama, dan memfasilitasi dialog untuk mencari kebenaran tanpa menghakimi
- B. Membela Siti karena Anda berteman baik dengan Siti sejak Sekolah Dasar
- C. Melaporkan keduanya langsung kepada Kepala Sekolah agar mereka berdua diskors
- D. Membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri karena itu urusan pribadi

Jawaban: Melerai keduanya, meminta mereka duduk bersama, dan memfasilitasi dialog untuk mencari kebenaran tanpa menghakimi

Penjelasan: Dalam SJT (Situational Judgement Test), respons terbaik adalah yang menunjukkan kepemimpinan, objektivitas, dan orientasi pada resolusi konflik secara damai.

6. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi dasar bagi semua peraturan di bawahnya adalah...

- A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- C. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- D. Peraturan Presiden

Jawaban: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penjelasan: Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

7. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Berdasarkan konsep tata urutan peraturan perundang-undangan, jika terjadi pertentangan antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang-Undang (UU) yang mengatur hal yang sama, maka asas hukum yang berlaku adalah...

- A. Lex Specialis Derogat Legi Generali
- B. Lex Posterior Derogat Legi Priori
- C. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
- D. Asas Retroaktif

Jawaban: Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Penjelasan: Asas 'Lex Superior Derogat Legi Inferiori' berarti peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, Perda tidak boleh bertentangan dengan UU.

8. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah berita melaporkan bahwa penyebaran berita bohong (hoaks) di media sosial meningkat tajam menjelang pemilihan umum. Hal ini memicu konflik di masyarakat. Pemerintah kemudian menggunakan UU ITE untuk menindak tegas para penyebar hoaks.

Berdasarkan berita di atas, mengapa sebuah negara yang demokratis tetap membutuhkan peraturan perundang-undangan yang ketat terkait penyebaran informasi?

- A. Agar pemerintah dapat mengontrol semua informasi dan mencegah kritik dari rakyat
- B. Untuk menjamin hak kebebasan berpendapat warga negara tidak melanggar hak orang lain serta menjaga ketertiban dan keamanan nasional
- C. Karena masyarakat Indonesia belum siap menerima kebebasan berpendapat secara penuh
- D. Untuk memberikan hukuman yang berat kepada pihak oposisi pemerintah

Jawaban: Untuk menjamin hak kebebasan berpendapat warga negara tidak melanggar hak orang lain serta menjaga ketertiban dan keamanan nasional

Penjelasan: Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Peraturan diperlukan untuk memastikan kebebasan individu tidak mencederai hak orang lain atau membahayakan ketertiban umum.

9. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Makna dari 'Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan' di Indonesia adalah...

- A. Susunan peraturan yang dibuat berdasarkan urutan abjad nama peraturan tersebut
- B. Susunan peraturan yang berjenjang dari yang tertinggi hingga terendah, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

C. Kumpulan aturan yang dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat secara setara

D. Daftar peraturan dari yang paling baru disahkan hingga peraturan yang paling lama

Jawaban: Susunan peraturan yang berjenjang dari yang tertinggi hingga terendah, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Penjelasan: Tata urutan bermakna hierarki, yaitu penjenjangan peraturan di mana produk hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.

10. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Sebuah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi melarang pendirian tempat ibadah agama tertentu di wilayahnya dengan alasan menjaga kearifan lokal. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan, evaluasi yang tepat terhadap Perda ini adalah...

A. Perda tersebut sah karena Pemerintah Daerah memiliki hak otonomi penuh untuk mengatur wilayahnya

B. Perda tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama

C. Perda tersebut dapat diberlakukan asalkan disetujui oleh seluruh tokoh masyarakat setempat

D. Perda tersebut perlu diubah menjadi Peraturan Presiden agar berlaku secara nasional

Jawaban: Perda tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama

Penjelasan: Sesuai hierarki hukum, Perda tidak boleh melanggar UUD 1945. Kebebasan beragama dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945, sehingga larangan pendirian tempat ibadah diskriminatif bersifat inkonstitusional.

11. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Apa yang akan terjadi pada sistem hukum suatu negara jika tidak ada hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan?

A. Sistem hukum akan menjadi lebih fleksibel dan mudah diubah oleh aparat penegak hukum

B. Hukum akan berjalan lebih cepat karena tidak perlu melalui proses penyelarasan norma

C. Terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum karena antarperaturan dapat saling bertentangan

D. Masyarakat akan lebih mudah mematuhi hukum karena peraturannya sejajar

Jawaban: Terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum karena antarperaturan dapat saling bertentangan

Penjelasan: Hierarki hukum berfungsi mencegah konflik norma. Tanpa hierarki, akan terjadi tumpang tindih (overlapping) dan kebingungan dalam penegakan hukum karena tidak ada standar supremasi.

12. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah...

A. UU No. 39 Tahun 1999

B. UU No. 20 Tahun 2003

C. UU No. 12 Tahun 2011

D. UU No. 22 Tahun 1999

Jawaban: UU No. 12 Tahun 2011

Penjelasan: UU No. 12 Tahun 2011 mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta hierarkinya.

13. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, peraturan yang berada tepat di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah...

A. Ketetapan MPR

B. Peraturan Presiden

C. Peraturan Daerah Provinsi

D. Peraturan Pemerintah (PP)

Jawaban: Peraturan Pemerintah (PP)

Penjelasan: Urutan hierarki: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota.

14. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Presiden berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Syarat utama Presiden mengeluarkan Perppu menurut UUD 1945 adalah...

A. Dalam kondisi negara sedang melaksanakan pemilihan umum

B. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

- C. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat sedang dalam masa reses
- D. Saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri

Jawaban: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

Penjelasan: Pasal 22 UUD 1945 menyatakan Presiden berhak menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (krisis, kekosongan hukum mendesak).

15. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Pemerintah mengeluarkan Perppu untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, saat masa persidangan berikutnya, DPR melakukan rapat paripurna dan menolak Perppu tersebut.

Berdasarkan wacana di atas, apa konsekuensi logis secara hukum apabila Perppu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR?

- A. Perppu tersebut tetap berlaku karena Presiden memiliki hak prerogatif
- B. Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- C. Perppu tersebut otomatis turun derajatnya menjadi Peraturan Presiden
- D. Perppu tersebut diajukan ke Mahkamah Agung untuk disahkan secara sepihak

Jawaban: Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, Perppu harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya. Jika tidak disetujui, Perppu tersebut harus dicabut.

16. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Ketetapan MPR (Tap MPR) pernah dihapus dari hierarki hukum pada masa awal Reformasi, namun dimasukkan kembali melalui UU No. 12 Tahun 2011. Analisislah alasan logis mengapa Tap MPR perlu dimasukkan kembali ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan!

- A. Karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang setara dengan Presiden
- B. Untuk membatasi kewenangan Presiden dalam membentuk Perppu
- C. Untuk memberikan status hukum yang jelas bagi Ketetapan MPR masa lalu yang masih berlaku hingga saat ini
- D. Agar MPR dapat kembali mengubah UUD 1945 tanpa persetujuan rakyat

Jawaban: Untuk memberikan status hukum yang jelas bagi Ketetapan MPR masa lalu yang masih berlaku hingga saat ini

Penjelasan: Banyak Tap MPR masa lalu (seperti Tap MPRS tentang larangan PKI) yang materinya masih berlaku. Dimasukkannya kembali Tap MPR dalam hierarki memberikan kepastian hukum bagi ketetapan-ketetapan tersebut.

17. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden disebut...

- A. Peraturan Pemerintah
- B. Undang-Undang
- C. Peraturan Presiden
- D. Ketetapan MPR

Jawaban: Undang-Undang

Penjelasan: Sesuai UUD 1945, Undang-Undang (UU) adalah produk legislasi yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

18. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian (judicial review) Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah...

- A. Mahkamah Agung (MA)
- B. Komisi Yudisial (KY)
- C. Mahkamah Konstitusi (MK)
- D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Jawaban: Mahkamah Konstitusi (MK)

Penjelasan: Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

19. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah Pemerintah Kota (Pemkot) berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum. Dalam rancangannya, Pemkot akan mengusir semua Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa menyediakan tempat relokasi. Sejumlah LSM menolak karena dianggap melanggar hak atas penghidupan yang layak yang dijamin Konstitusi.

Berdasarkan stimulus tersebut, manakah rancangan Perda yang paling mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan UU yang berlaku?

- A. Perda melarang total keberadaan PKL di seluruh wilayah kota tanpa kompromi
- B. Perda mengizinkan PKL berjualan di mana saja tanpa batasan agar ekonomi rakyat berkembang pesat
- C. Perda menetapkan zonasi bagi PKL di tempat yang aman dan strategis, serta memberikan pembinaan kewirausahaan
- D. Perda mewajibkan PKL membayar pajak yang sangat tinggi untuk mengurangi jumlah mereka secara paksa

Jawaban: Perda menetapkan zonasi bagi PKL di tempat yang aman dan strategis, serta memberikan pembinaan kewirausahaan

Penjelasan: Perda yang baik harus sejalan dengan HAM dan prinsip kesejahteraan (UUD). Relokasi terorganisir (zonasi) dan pembinaan adalah solusi win-win yang tertib namun tidak merampas hak ekonomi warga.

20. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Apabila kamu menemukan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang, lembaga mana yang berwenang untuk menguji PP tersebut secara hukum?

- A. Mahkamah Konstitusi (MK)
- B. Mahkamah Agung (MA)
- C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- D. Presiden Republik Indonesia

Jawaban: Mahkamah Agung (MA)

Penjelasan: Pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (seperti PP, Perpres, Perda) terhadap Undang-Undang adalah kewenangan Mahkamah Agung (MA).

21. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Penerapan peraturan di sekolah, seperti kewajiban siswa untuk tidak melakukan perundungan (bullying), sebenarnya merupakan implementasi langsung dari hukum negara di tingkat dasar, yaitu...

- A. Peraturan Pemerintah tentang otonomi daerah
- B. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- C. UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan atas hak asasi manusia setiap warga negaranya
- D. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang retribusi daerah

Jawaban: UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan atas hak asasi manusia setiap warga negaranya

Penjelasan: Aturan anti-bullying di sekolah merupakan implementasi dari jaminan perlindungan HAM yang diatur secara mendasar dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28.

22. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Skenario Situational Judgement Test (SJT)

Di perempatan jalan, lampu lalu lintas menyala merah. Tidak ada polisi yang berjaga dan kondisi jalan sangat sepi. Sikap yang mencerminkan komitmen terhadap penerapan peraturan perundang-undangan adalah...

- A. Menerobos lampu merah dengan hati-hati karena jalanan sepi dan tidak ada bahaya
- B. Tetap berhenti dan menunggu hingga lampu berubah hijau karena mematuhi hukum harus didasari kesadaran diri, bukan karena takut pada petugas
- C. Menerobos lampu merah jika ada kendaraan lain yang juga ikut menerobos
- D. Berhenti sejenak, lalu melaju secara perlahan agar tidak membuang waktu

Jawaban: Tetap berhenti dan menunggu hingga lampu berubah hijau karena mematuhi hukum harus didasari kesadaran diri, bukan karena takut pada petugas

Penjelasan: Kepatuhan hukum yang sejati (internalized compliance) terjadi ketika seseorang taat aturan tanpa harus diawasi oleh aparat penegak hukum, demi keselamatan diri dan orang lain.

23. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Sebagai siswa SMP yang sedang mempelajari tata urutan perundangan, bagaimana cara terbaik kamu mengimplementasikan pemahamanmu tentang supremasi hukum di lingkungan sekolah?

- A. Mengawasi guru-guru agar mereka tidak melanggar hukum negara
- B. Mempelajari tata tertib sekolah, menaatinya dengan ikhlas, dan mengajak teman-teman untuk tidak melanggar aturan secara persuasif
- C. Menghafal seluruh isi UUD NRI Tahun 1945 dan mengabaikan pelajaran lain
- D. Melaporkan sekolah ke polisi jika ada aturan sekolah yang dirasa memberatkan siswa

Jawaban: Mempelajari tata tertib sekolah, menaatinya dengan ikhlas, dan mengajak teman-teman untuk tidak melanggar aturan secara persuasif

Penjelasan: Bentuk implementasi tertinggi di tingkat sekolah adalah pemahaman tata tertib, ketaatan sukarela, dan peran aktif mengajak orang lain patuh tanpa paksaan (persuasif).

24. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Banyaknya kasus penipuan online dan peretasan data pribadi membuat masyarakat resah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama DPR menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelumnya, payung hukum mengenai ini masih tersebar dan kurang kuat.

Berdasarkan wacana di atas, dapat dievaluasi bahwa peraturan hukum di Indonesia...

- A. Bersifat statis dan tidak boleh diubah sejak Indonesia merdeka
- B. Memiliki sifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru di masyarakat
- C. Tidak efektif jika tidak ada dukungan langsung dari pihak asing
- D. Selalu tertinggal dan tidak mampu mengadili kejahatan masa kini

Jawaban: Memiliki sifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru di masyarakat

Penjelasan: Peraturan hukum tidak kaku, melainkan dinamis menyesuaikan dengan zaman. Kasus UU ITE menunjukkan hukum beradaptasi dengan munculnya kejahatan siber.

25. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Sikap yang harus ditunjukkan oleh warga negara apabila ada perubahan Undang-Undang yang telah disahkan secara konstitusional oleh pemerintah dan DPR adalah...

- A. Menerima dan mematuhi aturan tersebut karena telah disahkan melalui proses yang sah, dan jika keberatan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi
- B. Melakukan demonstrasi anarkis untuk memaksa pemerintah mencabut undang-undang tersebut
- C. Menolak mematuhi aturan tersebut dan mengajak masyarakat lain untuk membangkang
- D. Mengabaikan aturan tersebut karena menganggap hukum hanya menguntungkan pejabat

Jawaban: Menerima dan mematuhi aturan tersebut karena telah disahkan melalui proses yang sah, dan jika keberatan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi

Penjelasan: Sikap konstitusional terhadap hukum yang sah adalah memaatuhinya. Jika ada keberatan materiil, langkah demokratis dan hukum yang tepat adalah mengajukan uji materi (judicial review) ke MK.

26. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh...

- A. Gubernur dengan persetujuan DPRD Provinsi
- B. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Presiden
- C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota
- D. Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati

Jawaban: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota

Penjelasan: Sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan, Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh legislatif daerah (DPRD Kab/Kota) bersama eksekutif daerah (Bupati/Wali Kota).

27. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering diibaratkan seperti piramida. Analisis makna dari bentuk piramida tersebut!

- A. Semua peraturan memiliki kedudukan dan jumlah yang sama rata dalam sistem ketatanegaraan
- B. Peraturan di bagian atas lebih mudah diubah dibandingkan peraturan di bagian bawah yang lebih kuat
- C. Peraturan di bagian atas jumlahnya lebih sedikit namun sifatnya sangat mendasar, sedangkan peraturan di bawahnya lebih banyak dan bersifat teknis operasional
- D. Peraturan perundang-undangan hanya mementingkan kekuasaan para pembuat kebijakan di puncak pemerintahan

Jawaban: Peraturan di bagian atas jumlahnya lebih sedikit namun sifatnya sangat mendasar, sedangkan peraturan di bawahnya lebih banyak dan bersifat teknis operasional

Penjelasan: Piramida hukum menggambarkan bahwa Konstitusi (puncak) jumlahnya satu dan berisi prinsip dasar. Makin ke bawah (Perpres, Perda), jumlahnya makin banyak dan isinya semakin detail/teknis.

28. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Teks Proklamasi Kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara memiliki kaitan yang sangat erat dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai...

- A. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar
- B. Satu kesatuan dengan Peraturan Pemerintah
- C. Sumber dari segala sumber hukum negara
- D. Aturan tertulis yang setingkat dengan Peraturan Presiden

Jawaban: Sumber dari segala sumber hukum negara

Penjelasan: Pancasila adalah norma dasar (Staatsfundamentalnorm) yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga UUD 1945 dan undang-undang di bawahnya harus menjiwai nilai Pancasila.

29. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Skenario Situational Judgement Test (SJT)

Kamu sedang mengikuti ujian akhir semester. Teman sebangkumu yang sangat baik dan sering menolongmu meminta bantuan dengan memberikan isyarat agar kamu memperlihatkan jawabanmu. Ia berdalih nilai ini sangat penting agar ia tidak tinggal kelas. Berdasarkan komitmen mematuhi peraturan, tindakanmu adalah...

- A. Memberikan satu atau dua jawaban yang tidak terlalu penting agar ia tidak kecewa
- B. Menolak dengan halus dan tetap fokus mengerjakan soal sendiri, karena kejujuran dan aturan sekolah lebih utama dari pertemanan yang salah
- C. Pura-pura tidak melihat panggilannya agar dia tidak marah nantinya
- D. Meminta imbalan setelah ujian selesai sebagai ganti telah membantunya

Jawaban: Menolak dengan halus dan tetap fokus mengerjakan soal sendiri, karena kejujuran dan aturan sekolah lebih utama dari pertemanan yang salah

Penjelasan: SJT (Situational Judgement Test) ini menguji integritas. Integritas berarti menempatkan prinsip kejujuran dan kepatuhan pada aturan di atas kedekatan personal (nepotisme/pertemanan).

30. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Mengapa sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan merokok di tempat umum sangat penting diimplementasikan secara ketat?

- A. Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui denda bagi pelanggar
- B. Untuk membatasi hak asasi para perokok agar mereka berhenti merokok secara total
- C. Untuk melindungi hak kesehatan warga negara lainnya yang tidak merokok (perokok pasif) dari paparan asap rokok
- D. Agar daerah tersebut mendapatkan penghargaan sebagai kota sehat dari pemerintah pusat

Jawaban: Untuk melindungi hak kesehatan warga negara lainnya yang tidak merokok (perokok pasif) dari paparan asap rokok

Penjelasan: Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat, terutama melindungi hak perokok pasif untuk menghirup udara bersih, sesuai dengan amanat UU Kesehatan.

31. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Sebuah sekolah swasta memiliki aturan bahwa setiap siswa yang ketahuan merusak fasilitas sekolah wajib menggantinya 10 kali lipat dari harga barang tersebut. Aturan ini mendapat protes keras dari wali murid.

Evaluasi yang tepat terhadap aturan sekolah ini berdasarkan prinsip hukum negara adalah...

- A. Aturan tersebut sangat baik karena akan memberikan efek jera yang luar biasa bagi pelaku perusakan
- B. Aturan tersebut tidak adil dan bersifat memeras; sanksi seharusnya berfokus pada ganti rugi yang setimpal dan pembinaan karakter
- C. Aturan tersebut sah karena sekolah swasta bebas membuat aturan apa saja tanpa terikat prinsip hukum negara
- D. Aturan tersebut harus didukung agar fasilitas sekolah cepat bertambah banyak dari hasil denda

Jawaban: Aturan tersebut tidak adil dan bersifat memeras; sanksi seharusnya berfokus pada ganti rugi yang setimpal dan pembinaan karakter

Penjelasan: Hukum dan aturan (termasuk di sekolah) harus proporsional dan tidak boleh sewenang-wenang (memeras). Ganti rugi yang wajar dan edukasi jauh lebih sejalan dengan prinsip keadilan hukum di Indonesia.

32. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Dalam sistem tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksana Undang-Undang adalah...

- A. Peraturan Presiden (Perpres)
- B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- C. Peraturan Daerah Provinsi
- D. Peraturan Pemerintah (PP)

Jawaban: Peraturan Pemerintah (PP)

Penjelasan: Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

33. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Jika sebuah Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan untuk melaksanakan suatu Undang-Undang (UU) yang baru disahkan, apa dampak yang paling mungkin terjadi di lapangan?

- A. Undang-Undang tersebut akan otomatis dibatalkan oleh Mahkamah Agung
- B. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara teknis karena ketiadaan aturan operasional
- C. Presiden akan langsung membuat Perppu untuk menggantikan peran PP
- D. Masyarakat bebas mengartikan Undang-Undang tersebut sesuai keinginan masing-masing

Jawaban: Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara teknis karena ketiadaan aturan operasional

Penjelasan: Undang-Undang biasanya bersifat umum. Tanpa Peraturan Pemerintah yang berisi petunjuk teknis/operasional, aparat penegak hukum dan instansi terkait akan kesulitan menerapkan UU tersebut di lapangan.

34. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Apa yang menjadi alasan utama warga negara diwajibkan untuk menaati dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?

- A. Karena pemerintah akan memberikan sanksi denda yang sangat besar bagi pelanggarnya
- B. Untuk mempermudah pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat
- C. Untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang menjamin kesejahteraan bersama seluruh masyarakat
- D. Agar Indonesia terlihat patuh di mata dunia internasional dan mendapatkan pinjaman dana

Jawaban: Untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang menjamin kesejahteraan bersama seluruh masyarakat

Penjelasan: Ketaatan hukum diperlukan bukan sekadar untuk menghindari hukuman, melainkan fungsi utamanya adalah menciptakan ketertiban, keadilan sosial, dan kesejahteraan kolektif.

35. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara seringkali membuat masyarakat apatis terhadap penegakan hukum. Korupsi merusak sendi-sendi keadilan dan merampas hak rakyat untuk mendapatkan pembangunan yang merata.

Berdasarkan wacana, langkah komitmen jangka panjang apa yang paling strategis untuk ditanamkan sejak dini (usia SMP) agar generasi mendatang tidak melakukan korupsi?

- A. Mewajibkan siswa menghafal seluruh pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- B. Menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab melalui pembiasaan di sekolah dan rumah
- C. Membawa seluruh siswa untuk melakukan studi wisata ke penjara khusus koruptor setiap bulan
- D. Mengurangi jam pelajaran akademik untuk digantikan dengan simulasi sidang pengadilan setiap hari

Jawaban: Menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab melalui pembiasaan di sekolah dan rumah

Penjelasan: Pendidikan karakter antikorupsi yang diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari (kejujuran saat ujian, tanggung jawab) adalah langkah paling fundamental (akar pencegahan) untuk generasi penerus.

36. [Pilihan Ganda] (SJT/HOTS)

Stimulus: Skenario Situational Judgement Test (SJT)

Kamu melihat fasilitas tempat sampah di taman kota dirusak oleh oknum tidak dikenal. Sebagai warga negara yang sadar akan peraturan lingkungan, sikap yang harus kamu ambil adalah...

- A. Mencari pelaku sendiri dan menghakiminya karena telah merusak fasilitas umum
- B. Membiarkan saja karena itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, bukan urusan pribadi
- C. Melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kebersihan atau pihak berwenang setempat agar dapat segera diperbaiki atau ditindaklanjuti
- D. Mengambil sisa-sisa tempat sampah tersebut untuk dibawa pulang dan dimanfaatkan

Jawaban: Melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kebersihan atau pihak berwenang setempat agar dapat segera diperbaiki atau ditindaklanjuti

Penjelasan: Tindakan yang menunjukkan kepedulian tanpa mengambil risiko main hakim sendiri adalah melaporkan kepada pihak berwenang. Ini wujud partisipasi warga yang taat prosedur hukum.

37. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali amendemen (perubahan). Alasan mendasar mengapa UUD 1945 perlu diamendemen pada awal masa Reformasi adalah...

- A. Untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi baru yang lebih modern
- B. Untuk memberikan kekuasaan yang mutlak kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan
- C. Untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan tuntutan zaman
- D. Agar negara Indonesia dapat dengan mudah membagi wilayahnya menjadi beberapa negara bagian

Jawaban: Untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara agar lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan tuntutan zaman

Penjelasan: Amendemen UUD 1945 bertujuan membatasi kekuasaan eksekutif yang terlalu besar di masa lalu, menegakkan HAM, dan memperkuat check and balances dalam kerangka demokrasi yang modern.

38. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Kedudukan hukum adat atau hukum tidak tertulis dalam sistem perundang-undangan nasional Indonesia adalah...

- A. Sama sekali tidak diakui karena Indonesia hanya menganut hukum perundang-undangan tertulis
- B. Kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang jika diberlakukan di daerah pedesaan
- C. Diakui dan dihormati keberadaannya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI
- D. Wajib diubah secara paksa menjadi Peraturan Daerah agar diakui secara nasional

Jawaban: Diakui dan dihormati keberadaannya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI

Penjelasan: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui hukum adat dan hak tradisionalnya selama masih hidup dan sejalan dengan prinsip NKRI serta peraturan perundang-undangan nasional.

39. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Bagaimana jika seorang Kepala Desa membuat Peraturan Desa (Perdes) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten?

- A. Perdes tersebut tetap sah karena desa memiliki kewenangan otonomi murni yang tidak bisa diintervensi
- B. Perdes tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena Perda Kabupaten memiliki kedudukan hierarki yang lebih tinggi
- C. Perda Kabupaten yang harus direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi spesifik desa tersebut
- D. Masalah ini harus segera diselesaikan melalui Mahkamah Internasional

Jawaban: Perdes tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena Perda Kabupaten memiliki kedudukan hierarki yang lebih tinggi

Penjelasan: Mengacu pada asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Peraturan Desa berada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten. Jika bertentangan, Perdes tersebut tidak berlaku/dibatalkan.

40. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Ciri utama dari negara hukum (Rechtsstaat) adalah...

- A. Kekuasaan presiden bersifat absolut dan tidak terbatas oleh aturan apapun
- B. Adanya supremasi hukum di mana semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku
- C. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas menengah ke bawah
- D. Sistem pengadilan sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan militer

Jawaban: Adanya supremasi hukum di mana semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku

Penjelasan: Supremasi hukum berarti hukum memegang kekuasaan tertinggi; tidak ada seorang pun (termasuk pejabat) yang berada di atas hukum.

41. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Fenomena pelajar SMP mengendarai sepeda motor ke sekolah masih sering dijumpai. Secara hukum, mereka belum cukup umur untuk memiliki SIM C. Analisis akar penyebab pelanggaran ini dan solusi komprehensifnya adalah...

- A. Penyebabnya adalah kurang ketatnya polisi lalu lintas; solusinya polisi harus memenjarakan semua pelajar yang melanggar agar jera
- B. Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran hukum orang tua dan kurangnya transportasi umum; solusinya penyediaan bus sekolah dan edukasi keselamatan lalu lintas ke wali murid
- C. Penyebabnya adalah pelajar SMP ingin pamer kekayaan; solusinya melarang semua kendaraan pribadi masuk ke area sekolah

D. Penyebabnya adalah mahalnnya harga ojek online; solusinya pemerintah menurunkan tarif ojek online khusus pelajar

Jawaban: Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran hukum orang tua dan kurangnya transportasi umum; solusinya penyediaan bus sekolah dan edukasi keselamatan lalu lintas ke wali murid

Penjelasan: Masalah anak di bawah umur membawa motor berkaitan erat dengan izin orang tua dan fasilitas transportasi. Solusi komprehensif mengarah pada edukasi keluarga dan pengadaan transportasi publik.

42. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Salah satu bentuk implementasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan berbangsa dan bernegara adalah dengan membayar pajak tepat waktu. Mengapa hal ini penting?

- A. Untuk memperkaya aparat pemerintahan di daerah dan pusat
- B. Karena jika tidak membayar pajak, kewarganegaraan seseorang akan langsung dicabut
- C. Karena pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum dan kesejahteraan rakyat
- D. Sebagai syarat utama jika seseorang ingin bepergian ke luar negeri

Jawaban: Karena pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum dan kesejahteraan rakyat

Penjelasan: Pajak diatur dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa. Penerimaan pajak dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

43. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Sikap "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" adalah kiasan yang sering muncul dalam masyarakat ketika melihat ketidakadilan penegakan hukum. Bagaimana seharusnya sistem perundang-undangan di Indonesia bekerja untuk menghilangkan stigma negatif ini?

- A. Memberikan hukuman yang jauh lebih ringan kepada masyarakat kecil dibandingkan pejabat untuk menyeimbangkan keadilan
- B. Memastikan asas 'Equality Before the Law' dijalankan secara tegas, di mana setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan atau kekayaan
- C. Mengubah UUD 1945 agar terdapat pemisahan pengadilan antara pejabat tinggi dan rakyat jelata
- D. Menghapuskan sistem hukum positif dan menggantinya dengan kebiasaan masyarakat setempat

Jawaban: Memastikan asas 'Equality Before the Law' dijalankan secara tegas, di mana setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan atau kekayaan

Penjelasan: Equality Before the Law (Persamaan di hadapan hukum) adalah prinsip negara hukum di mana pejabat maupun rakyat biasa yang bersalah harus diadili dan dihukum sesuai porsi perbuatannya.

44. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas keterbukaan sangat ditekankan. Arti dari asas keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang adalah...

- A. Proses sidang paripurna DPR dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan terbuka agar bisa ditonton banyak orang
- B. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan
- C. Pemerintah harus mempublikasikan semua rahasia negara kepada publik tanpa ada yang ditutupi
- D. Hanya kalangan akademisi dan profesor hukum yang diperbolehkan mengkaji rancangan undang-undang

Jawaban: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan

Penjelasan: Asas keterbukaan (transparansi) mewajibkan pembuat undang-undang (DPR & Pemerintah) melibatkan partisipasi publik dan memberikan akses informasi terhadap draf peraturan yang sedang dibahas.

45. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Saat ini banyak terjadi perdebatan mengenai penerapan UU Hak Cipta, terutama terkait penggunaan karya orang lain di media sosial (seperti lagu atau gambar). Sebagai pengguna media sosial yang bijak, bagaimana implementasi aturan ini dalam perilakumu sehari-hari?

- A. Bebas menggunakan karya apa saja selama telah diedit sedikit agar tidak terlihat sama persis dengan aslinya
- B. Selalu mencantumkan sumber pembuat karya dan tidak menggunakan karya orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin langsung dari penciptanya
- C. Menyalin seluruh isi karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik pribadi karena media sosial adalah ruang publik yang bebas

D. Tidak peduli dengan UU Hak Cipta karena tidak akan ada aparat yang mengawasi media sosial secara penuh

Jawaban: Selalu mencantumkan sumber pembuat karya dan tidak menggunakan karya orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin langsung dari penciptanya

Penjelasan: UU Hak Cipta melindungi kekayaan intelektual. Pengguna media sosial wajib menghormati hak cipta (moral dan ekonomi) dengan mengatribusikan sumber dan meminta izin untuk monetisasi.

46. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Stimulus: Sebuah Pemerintah Daerah ingin menetapkan kurikulum muatan lokal secara sepihak dan mewajibkan semua sekolah mengubah struktur jam belajarnya yang bertentangan dengan ketetapan dari Kementerian Pendidikan. Pada akhirnya, aturan daerah tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Berdasarkan stimulus tersebut, mengapa pemerintah daerah harus merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional saat menyusun Perda Pendidikan?

- A. Karena pemerintah daerah tidak memiliki ahli hukum yang kompeten untuk membuat aturan mandiri
- B. Karena pemerintah daerah ingin mendapatkan dana bantuan pendidikan dari pemerintah pusat secara maksimal
- C. Karena Perda tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya dan penyelarasan ini mencegah kebingungan dalam implementasi kurikulum pendidikan di daerah
- D. Agar Perda Pendidikan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Kepala Sekolah tanpa persetujuan DPRD

Jawaban: Karena Perda tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya dan penyelarasan ini mencegah kebingungan dalam implementasi kurikulum pendidikan di daerah

Penjelasan: Prinsip hierarki mewajibkan produk hukum daerah sinkron dengan produk hukum pusat (UU). Hal ini menjamin standar nasional pendidikan tetap terjaga di seluruh daerah.

47. [Pilihan Ganda] (MOTS)

Di sekolahmu terdapat OSIS yang baru dibentuk. Ketua OSIS mengusulkan pembuatan 'Tata Tertib OSIS'.

Berdasarkan konsep hierarki hukum yang kamu pelajari, tata tertib OSIS tersebut posisinya...

- A. Menjadi aturan tertinggi yang harus dipatuhi bahkan oleh guru dan staf sekolah
- B. Berada sejajar dengan Tata Tertib Sekolah karena OSIS adalah representasi suara siswa
- C. Harus selaras dan berkedudukan di bawah Tata Tertib Sekolah yang telah dibuat oleh Kepala Sekolah
- D. Tidak mengikat sama sekali karena dibuat oleh sesama siswa, bukan oleh pihak berwenang tingkat negara

Jawaban: Harus selaras dan berkedudukan di bawah Tata Tertib Sekolah yang telah dibuat oleh Kepala Sekolah

Penjelasan: Menganalogikan negara ke sekolah, OSIS adalah sub-organisasi. Aturannya tidak boleh bertentangan dengan tata tertib induk (sekolah) yang ditetapkan otoritas tertinggi di sekolah (Kepsek).

48. [Pilihan Ganda] (LOTS)

Manakah dari pernyataan berikut yang BUKAN merupakan fungsi dari peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Indonesia?

- A. Sebagai pedoman untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat
- B. Sebagai sarana untuk melindungi hak asasi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang
- C. Sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara warga negara secara adil
- D. Sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu dan menekan kebebasan oposisi politik

Jawaban: Sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu dan menekan kebebasan oposisi politik

Penjelasan: Peraturan perundang-undangan berfungsi memberikan kepastian hukum, melindungi HAM, dan menciptakan ketertiban, bukan untuk menindas atau melanggengkan diktator.

49. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Keluarga adalah lingkungan terkecil dan pertama dalam kehidupan seseorang. Menanamkan kesadaran hukum sejak dini di lingkungan keluarga sangat efektif untuk membangun komitmen penegakan hukum secara nasional. Evaluasilah mengapa pernyataan tersebut benar!

- A. Karena hukuman yang diberikan orang tua di rumah biasanya jauh lebih berat daripada hukuman penjara
- B. Karena karakter, disiplin, dan pengenalan akan batasan benar-salah mulai dibentuk dari kebiasaan menaati aturan sederhana di rumah

- C. Karena negara akan membebaskan denda kepada orang tua apabila anaknya melanggar hukum
- D. Karena anggota keluarga bisa saling menutupi kesalahan jika terjadi pelanggaran hukum di kemudian hari

Jawaban: Karena karakter, disiplin, dan pengenalan akan batasan benar-salah mulai dibentuk dari kebiasaan menaati aturan sederhana di rumah

Penjelasan: Keluarga adalah agen sosialisasi primer. Kesadaran ketaatan pada hukum negara berakar kuat jika individu sejak kecil telah terbiasa dengan kedisiplinan dan nilai moral di rumah.

50. [Pilihan Ganda] (HOTS)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mengawal implementasi peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawalan masyarakat yang paling konstitusional jika menemukan penyimpangan anggaran oleh pejabat daerah adalah...

- A. Menyebarluaskan tuduhan belum terbukti ke media sosial agar pejabat tersebut langsung dicopot jabatannya
- B. Melakukan kerusakan fasilitas pemerintahan di daerah tersebut sebagai bentuk kemarahan rakyat
- C. Mengumpulkan bukti penyimpangan dan melaporkannya kepada instansi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan
- D. Menyandera keluarga pejabat yang bersangkutan agar ia bersedia mengembalikan uang negara

Jawaban: Mengumpulkan bukti penyimpangan dan melaporkannya kepada instansi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan

Penjelasan: Pelaporan ke institusi penegak hukum yang berwenang dengan membawa bukti awal adalah langkah hukum yang sesuai prosedur konstitusi, bukan dengan main hakim sendiri atau menyebar hoaks.